

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan dasar dalam perekonomian disamping kegiatan produksi. Menurut Suryaningsih (2015), konsumsi yang dilakukan oleh seseorang dapat mencerminkan kondisi sosial ekonominya. Semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang maka semakin tinggi kondisi perekonomiannya dan tingkat kesejahteraannya. Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi di bawah rata-rata digolongkan sebagai miskin.

Salah satu permasalahan klasik bagi negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang menghambat banyak kemajuan dari negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar. Indonesia sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang juga memiliki persoalan yang sama. Menurut Badan Pusat Statistik 2020, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Menurut Suryaningsih (2015), masih tingginya tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan belum berhasil sepenuhnya, karena salah satu tujuan dari pembangunan adalah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Penduduk miskin diartikan sebagai individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merefleksikan besarnya pendapatan yang diperoleh rumah tangga pada periode tertentu. Dengan terbatasnya jumlah pemasukan rumah tangga, kebutuhan yang utama yang akan dipenuhi oleh rumah tangga adalah kebutuhan akan makanan. Kebutuhan akan makanan rumah tangga akan lebih berorientasi pada banyaknya makanan yang dikonsumsi ketimbang pada pemenuhan zat gizi yang seimbang. Besarnya jumlah pendapatan akan sejalan dengan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Berhubungan dengan kemiskinan, hal penting yang perlu diperhatikan ialah masih banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah masyarakat yang terbilang miskin sangat tinggi terutama jika dikaitkan dengan upaya-upaya mengentaskan kemiskinan, baik melalui bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi, hal tersebut belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan belum bisa dikatakan dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini karena banyaknya bantuan yang tidak sampai pada sasaran.

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung pulau jawa dan merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin antara satu Kabupaten/Kota dengan lainnya sangat bervariasi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Jawa Timur maka bisa di lihat kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 1.1Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	2021	No	Kabupaten/Kota	2021
1	Malang	276.58	21	Bondowoso	115.18
2	Jember	257.09	22	Blitar	112.62
3	Sampang	237.23	23	Lumajang	105.25
4	Sumenep	224.73	24	Ponoroggo	89.94
5	Probolinggo	223.32	25	Situbondo	86.95
6	Bangkalan	215.97	26	Trenggalek	84.89
7	Tuban	192.58	27	Pacitan	84.19
8	Kediri	184.49	28	Madiun	81.61
9	Lamongan	166.82	29	Tulungagung	78.59
10	Bojonegoro	166.52	30	Magetan	67.75
11	Gresik	166.35	31	Kota Malang	40.62
12	Pasuruan	159.78	32	Kota Kediri	22.55
13	Kota Surabaya	152.49	33	Kota Probolinggo	17.91
14	Sidoarjo	137.15	34	Kota Pasuruan	13.97
15	Pamekasan	137.12	35	Kota Blitar	11.33
16	Banyuwangi	130.93	36	Kota Madiun	9.06
17	Ngawi	130.81	37	Kota Batu	8.63
18	Jombang	127.30	38	Kota Mojokerto	8.37
19	Nganjuk	125.53	Jawa Timur		4572.73
20	Mojokerto	120.54			

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022 (diolah)

Dari tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi menempati urutan ke enam belas tertinggi di Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 1.718.462 jiwa. Sebagai kabupaten terluas yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak potensi daerah, seperti rangkaian dataran tinggi ijen, dan potensi pariwisata alam. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup baik nyatanya angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi masih terbilang tinggi. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah penduduk miskin mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin berjumlah 138.54 ribu jiwa dengan persentase 8,64 persen. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 125.5 ribu jiwa dengan persentase 7,8 persen dan merupakan tingkat kemiskinan terendah. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan sebesar 121.37 ribu jiwa dengan persentase 7,52 persen. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 130.37 ribu jiwa dengan persentase 8,06 persen. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 130.930 ribu jiwa dengan persentase 8,07 persen. Adapun banyaknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin	8.64	7.8	7.52	8,06	8.07
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	138.54	125.5	121.37	130.37	130.930

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah penduduk maupun dari persentase penduduk miskin yang cenderung bertahan cukup lama karena adanya ketimpangan pendapatan penduduk yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sosial dan politik masing-masing keluarga miskin.

Kejadian ini ditunjukkan dengan terdapatnya beberapa rumah tangga yang secara ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu alasan terjadinya kemiskinan karena sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang memadai. Maka dapat dilihat perbandingan dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban untuk berperah aktif dalam pengentasan kemiskinan. Dalam Pasal UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan berkembangnya dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sehingga dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui pendidikan dan juga pekerjaan yang layak. Kemiskinan menjadi perhatian dan tanggung jawab tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga peran pemerintah daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan identik dengan jumlah rata-rata pengeluaran yang rendah atau ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehingga mengakibatkan minimnya kemampuan rumah tangga untuk memenuhi jumlah berbagai macam pangan yang dapat dikonsumsi (Sari, 2018).

Menurut Rachman (2021), pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga pada umumnya berbeda antar agroekosistem, antar kelompok pendapatan, antar etnik,

atau etnis dan lintas waktu. Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari struktur pola dan pengeluaran konsumsi rumah tangga itu sendiri. Dalam hal ini, rumah tangga dengan porsi pengeluaran untuk makanan tertinggi tergolong sebagai rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan yang rendah. Berbicara tentang pola konsumsi yang ideal logikanya adalah jika suatu rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Namun, kenyataannya pola konsumsi rumah tangga miskin sangat rendah.

Konsumsi keluarga adalah salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Dari komoditi yang di konsumsi itulah keluarga akan memiliki kepuasan tersendiri. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Badan Pusat Statistik Indonesia membedakan pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia menjadi dua yaitu makanan dan non makanan.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 persentase pengeluaran di Provinsi Jawa Timur pada jenis makanan sebesar 49 persen dan pada tahun 2021 sebesar 50,12 persen hal tersebut mengalami kenaikan. Sedangkan untuk konsumsi non makanan pada tahun 2020 sebesar 51 persen dan di tahun 2021 sebesar 49,88 persen hal tersebut mengalami penurunan. Jika hal tersebut dibandingkan antara kelompok makanan dan juga non makanan di Provinsi Jawa Timur persentase pengeluaran makanan lebih besar non makanan pada tahun 2020. Sehingga bisa dikatakan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur pada tahun

2021 mengalami penurunan. Hal tersebut juga serupa dengan Kabupaten Banyuwangi dimana persentase pengeluaran lebih besar di jenis makanan di bandingkan dengan non makanan.

Berdasarkan data pada tabel 1.3 mengenai persentase pengeluaran perkapita sebulan menurut jenis pengeluaran (rupiah) di Kabupaten Banyuwangi terlihat bahwa pada kelompok makanan dan non makanan dari tahun 2017–2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mengalami penurunan pada pengeluaran jenis makanan, sedangkan pada pengeluaran non makanan terjadi kenaikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi di Kabupaten Banyuwangi cenderung pada konsumsi makanan dibandingkan non makanan dan hal tersebut bisa dikatakan tingkat kesejahteraan ekonominya masih rendah.

Tabel 1. 3 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2017-2021

Kabupaten Banyuwangi		
Tahun	Kelompok Makanan	
	Makanan	Non Makanan
2017	58.01	41.99
2018	53.60	46.40
2019	41.02	48.98
2020	50.91	49.09
2021	55.09	44.95
Provinsi Jawa Timur		
Tahun	Makanan	Non Makanan
2017	50.79	49.21
2018	49.97	50.03
2019	48.53	51.47
2020	49	51
2021	50.12	49.88

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Banyuwangi bekerja sebagai ibu rumah tangga, petani, buruh tani, buruh bangunan atau yang bekerja di sektor informal, pengangguran (orang belum mempunyai pekerjaan atau mencari pekerjaan). Pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang taraf hidupnya relatif rendah, terutama berkaitan dengan tempat tinggalnya. Penduduk miskin ini umumnya memiliki pendapatan yang relatif rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagian besar dari pendapatan mereka dialokasikan pada pengeluaran konsumsi makanan dari pada konsumsi non makanan. Konsumsi makanan masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari belanja untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah-buahan, bahan minuman, rempah-rempah sedangkan konsumsi bukan makanan meliputi perumahan, bahan bakar, penerangan, air, aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya pengobatan, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pajak pemakaian, premi asuransi, barang yang tahan lama, keperluan pesta.

Kecenderungan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Banyuwangi lebih mengutamakan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder. Kondisi tersebut bersumber dari ketidakmampuan rumah tangga memperoleh akses terhadap model kerja. Hal ini menyebabkan mereka kurang mempunyai penghasilan secara mandiri. Selanjutnya, kemiskinan juga di domisi oleh akses pendidikan rumah tangga yang masih rendah.

Pendapatan seseorang dalam kehidupan akan mempengaruhi jumlah pengeluaran berupa sejumlah kebutuhan yang akan di konsumsi dalam suatu periode. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan maka semakin besar pula jumlah pengeluarannya karena dengan pendapatan yang besar mereka cenderung akan mengkonsumsi barang yang dibutuhkan lebih banyak pula. Peningkatan pendapatan akan mengubah konsumsi anggota masyarakat karena adanya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima diantara setiap keluarga dan sesuai dengan tingkat yang dibutuhkan dan tingkat kemampuannya dalam mengelola.

Menurut Hartati dkk, (2016) Hukum Engel menyatakan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah akan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok. Sebaliknya, rumah tangga berpenghasilan tinggi hanya akan menghabiskan sebagian kecil dari total pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar. Adiana dan Karmini (2016) lebih lanjut menekankan bahwa faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumsi selain pendapatan adalah budaya. Thamrin (2017) lebih lanjut menambahkan bahwa dalam perekonomian nasional konsumsi nasional dipengaruhi oleh pendapatan nasional, suku bunga deposito dan inflasi. Pendapatan mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengkonsumsi baik secara kualitas maupun kuantitas. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Menurut Tamawiji dkk,(2015) konsumsi masyarakat memang sangat tergantung pada sumber pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka semakin tinggi pula kebutuhan yang akan dapat dipenuhi. Perilaku konsumen

pada dasarnya adalah memiliki berbagai kombinasi konsumsi beberapa barang yang dapat memaksimumkan kepuasannya. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh. Rumah tangga dengan pendapatan rendah akan mendahulukan pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Pendapatan rumah tangga bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pengeluaran untuk konsumsi pangan rumah tangga. Masih ada faktor lain yang turut memberikan kontribusinya yaitu jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, lama berumah tangga dan jumlah subsidi beras miskin (raskin) yang diterima (Yuliana dkk,2015)

Menurut Adiana & Karmini (2016) jumlah tanggungan dalam keluarga adalah suatu unsur yang dapat meningkatkan jumlah konsumsi rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa apabila terdapat jumlah anggota keluarga yang banyak maka jumlah barang yang dikonsumsi juga semakin beragam tergantung pada permintaan masing-masing individu dalam keluarga tersebut karena adanya perbedaan selera antara individu yang satu dengan yang lainnya sehingga akan mempengaruhi peningkatan konsumsi dalam suatu rumah tangga. Prihartini (2016) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, ia memaparkan korelasi positif antara hubungan sosial dengan konsumsi rumah tangga.

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) membuktikan bahwa semakin besar jumlah atau ukuran rumah tangga, semakin besar pula proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan non makanan. Artinya,

semakin kecil ukuran keluarga maka semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan pangan. Selebihnya, keluarga akan mengalokasikan sisa pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bukan makanan. Dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, pola konsumsi semakin bervariasi karena belum tentu setiap anggota rumah tangga memiliki selera yang sama. Jumlah anggota keluarga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga.

Tinggi rendahnya pendidikan juga mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tingkat pendidikan sangat besar dampaknya pada sosial ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka seseorang akan lebih mudah menerima segala perkembangan yang ada di sekitarnya, dan sebaliknya jika pendidikan yang dimiliki itu rendah maka kemungkinan untuk menerima suatu perkembangan yang ada di sekitarnya akan sedikit mengalami kesulitan. Jadi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang memiliki peranan penting terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Astrini dan Purbadharmaja (2018) pola konsumsi pangan tergantung dari pendidikan rumah tangga, bahwa semakin tinggi pendidikan formal masyarakat maka pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan akan menyebabkan semakin bervariasinya pangan yang dikonsumsi.

Menurut Riyadi (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, pada umumnya semakin tinggi pula kesadaran

untuk memenuhi pola konsumsi yang seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi serta selektif dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. Pendidikan adalah investasi penting. Dengan mendapatkan pendidikan yang baik, seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik pula. Oleh karena itu, dengan pendidikan seseorang atau rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendidikan diharapkan mampu mengatasi keterbelakangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui dampak yang ditimbulkannya yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Hal senada dikatakan oleh Helen F. Ladd (2014) bahwa pendidikan memberikan banyak kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara.

Meskipun sudah ada penelitian tentang pengeluaran konsumsi. Beberapa penelitian (Sanjaya dan Dewi, 2017; Vidiawan dan Tisnawati, 2015; dan Selian dan Jannah, 2018) menjelaskan bahwa pendapatan, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil tersebut, belum banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai konsumsi di Kabupaten Banyuwangi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin dapat berbeda di setiap wilayah atau daerah. Dalam penelitian ini perbedaan karakteristik pada wilayahnya seperti wilayah pesisir, wilayah perdesaan di daerah pegunungan dan perkotaan. Menurut Saputri dkk, (2016) dan Miranti dkk, (2016) wilayah tempat tinggal rumah tangga yaitu perkotaan dan perdesaan akan mempengaruhi perilakunya dalam konsumsi pangan. Perbedaan yang terjadi dapat di karenakan perbedaan pendapatan dan harga pangan. Menurut Fauzi (2017) masyarakat yang tinggal di pesisir untuk memenuhi kebutuhannya mereka

menangkap ikan di laut. Sehingga masyarakat pesisir untuk konsumsi makanan lebih sering mengalokasikan konsumsinya pada hasil yang ditangkap oleh masyarakat pesisir. Lain halnya dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan atau perdesaan. Thamrin (2017) masyarakat yang tinggal diperkotaan atau perdesaan untuk memenuhi hidupnya dengan bercocok tanam sebagai petani. Kemudian, beberapa penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan analisis yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian, sehingga studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dan analisis yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat fokus pada memahami gap-gap tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan hasil penelitian terdahulu serta teori-teori relevan yang telah dikemukakan. Maka variabel pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi. Variabel pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, dan Jumlah Anggota Keluarga, Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi?
- 2) Bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi?
- 3) Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi?
- 4) Bagaimana pengaruh pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.
- b. Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui analisis faktor pola konsumsi di suatu wilayah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan dasar kebijaksanaan dalam upaya memperbaiki pola konsumsi masyarakat.
- b. Mengetahui sejauh mana keberhasilan program yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.